BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Teori

Analysis Kemampuan Lahan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu wilayah dan untuk mengetahui tingkat potensi lahan yang didasarkan pada aspek fisik dasar dan dapat mengetahui daerah yang bisa dikembangkan atau tidak dapat dikembangkan.

Untuk mengetahui Satuan Kemampuan Lahan, maka diperlukan beberapa tahapan SKL yaitu mengetahui SKL Morfologi, mengetahui SKL Kemudahan Dikerjakan, mengetahui SKL Kestabilan Lereng, mengetahui SKL Pondasi, mengetahui SKL Ketersediaan Air, mengetahui SKL Lahan Drainase, mengetahui SKL Drainase, SKL terhadap Erosi, SKL Pembuangan Limbah, SKL bencana. Apabila sudah melakukan SKL seperti yang diatas yang sudah disebutkan, maka dilakukan *overlay* dan diberi skor agar mengetahui Satuan Kemampuan Lahan di Daerah tersebut.

Dalam tinjauan teori, pada penelitian in menggunakan beberapa teori.

1.1.1. Penggunaan Lahan dan Penutupan Lahan

Lahan yang dikelola oleh masyarakat akan mempunyai jenis atau bentuk penggunaan lahan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang mengelola. Penggunaan lahan (*land use*) adalah sebuah realisasi dari tujuan manusia dalam mengeksploitasi penutupan lahan (*landcover*) , dalam rangka pemenuhan kebutuhan material ataupun spiritual manusia tersebut (Arsyad, 2010).

Penggunaan lahan digolongkan dalam dua bentuk yang paling banyak, yakni sebagai pengembangan bidang pertanian dan non-pertanian. (Arsyad, 2010). menurut Rustiadi dkk tahun 2009, definisi ke duanya tersebut dapat saja memiliki arti yang sama, tetapi berbeda penekanan. Pengelolaan lahan (landuse) berhubungan dnegan kegiatan mengelola lahan tersebt oleh aktifitas manusia, sedangkan penutupan lahan (landcover) cenderung menekankan pada kondisi fisiknya(Rustiadi, Saefulhakim, 2009).

Oleh sebab itu, perlu adanya pengetahuan atau informasi yang harus dipelajari oleh masyarakat terkait dnegan penggunaan lahan dan penutupan lahan dikarenakan hal tersebut erat kaitannya dnegan kondisi bumi (Kiefer dan Lillesand, 1990). Namun dengan melihat faktor yang mempengaruhi menurut Hidayati (2013), penutupan lahan dan penggunaan lahan, dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi geologi dan geomorfologi, elevasi, macam-macam dan bentuk tanah, dan cuaca. Demikian pula, kondisi topografi mempengaruhi struktur dan komposisi vegetasi.

1.1.2. Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibuat pemerintahan yang berhubungan dnegan fungsi mengendalikan pembangunan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi s ehingga dapat membantu mempermudah akomodasi kemampuan dan *problem solving* (Ruslisan et al, 2015). Keselarasan antara penggunaan lahan dengan RTRW perlu untuk mengakomodir potensi kerusakan lahan dan mengatasi permasalahan konflik sosial. Masing-masing ruangan mempunyai jenis yang tidka sama, sehingga dalam rencana tata ruang faktor teknis seperti keselarasan penggunaan lahan perlu diperhatikan. Namun tidak selamanya faktor teknis menjadi dasar pertimbangan, melainkan faktor sosial dan

psikis masyarakat lebih dominan berpengaruh kepada perencanaan tata (Zulkaidi dan Natalivan, 2005).

Penggunaan lahan eksisting terhadap ruang yang sudah ditentukan berdasar rencana tata ruang memberikan kesimpulan selaras atau tidak selaras. Jika tidak selaras terhadap perencanaan berarti telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan lahan, sehingga perlu sebuah kebijakan penataan ruang yang bersifat nasional dan wajib untuk diterapkannya sesuai yang diatur perundangan (Syahadat dan Subarudi, 2012).

Penyebab terjadinya penyimpangan dalam penggunaan lahan menurut Eko dan Rayahu (2012), meskipun faktor tata laksana, langkah perencanaan, pengawasan dan pengendalian telah dilakukan dengan menyesuaikan aturan yang berlaku namun belum disertai dengan adanya tindakan *preventif* ataupun *punishment* dari segala sesuatu yang melanggarnya.

1.1.3. Kemampuan Lahan

Wells dalam Gad (2015) mendefinisikan kemampuan lahan sebagai kemampuan lahan untuk mendukung jenis penggunaan lahan tertentu tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Untuk mengoptimalkan sebuah lahan dalam pemanfaatannya, perlu sebuah perencanaan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut (Firdian et al. 2010). Degradasi lahan dapat terjadi dikarenakan kesalahan memilih lahan yang akan dikola atau dipergunakan sehingga akan menurunkan daya dukungnya (Wahyunigrum, 2016). Perencanaan tata ruang yang tepat dengan memperhatikan aspek kemampuan lahan dan kesesuaian lahan

dapat mencegah terjadinya degradasi lahan (Widiatmaka, Ambarwulan, Purwanto, Setiawan⁴, & Effendi, 2015)

Kerangka sistem evaluasi lahan ini membagi kesesuaian lahan dalam kategori “Ordo, Kelas, Sub-kelas dan Unit”. Tingkatan Ordo dibagi dalam dua ordo, sesuai (S) dan tidak sesuai (N). Ordo sesuai kemudian dikelompokkan lagi dalam tiga kelas yaitu sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2) dan sesuai marginal (S3). Ordo tidak sesuai dibagi dalam dua kelas yaitu N1 (tidak sesuai saat ini) dan N2 (tidak sesuai untuk selamanya).

1.2. Tinjauan Kebijakan

Dalam tinjauan kebijakan, terdapat beberapa kebijakan yang digunakan sebagai dasar hukum atau acuan pada penelitian ini.

1.2.1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Menurut UU No 26 Tahun 2007 terkait dengan tata ruang sebagaimana didefinisikan dengan bentuk struktural dan pengelolaan lahan yang sesuai tentang Penataan Ruang, tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang secara terencana ataupun tidak.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan daerah ialah SDA, dan terdapat adanya batasan dalam beradaptasi dengan aktivitas seseorang dalam memanfaatkan SDA itu sendiri. Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa kerugian atau korban jiwa akibat penggunaan lahan yang tidak tepat melebihi kapasitasnya. Oleh karena itu, karakteristik alam suatu daerah atau wilayah perlu dipahami sedini mungkin untuk mengembangkan potensial SDA dan kerentanan bahaya yang ada, selanjutnya

mengubahnya menjadi potensi dan pembatasan pengembangan daerah atau wilayah tersebut.

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Rencana tata ruang wilayah dapat dijelaskan dengan menarik beberapa definisi yang ada mengenai ruang serta penataanya. Sesuai PP No. 15 th 2010 terkait dengan menyelenggarakan penataan ruang pasal 1 ayat 1, yakni suatu ruang dengan daratan, lautan, udara dengan wilayah yang dimana terdapat kehidupan manusia atau ekosistem alami.

Pasal 1 ayat 2 pada PP No 15 Tahun 2010 dijelaskan, penataan ruang merupakan suatu bentuk struktural dari tempat dan pola. Dalam tata ruang sebuah wilayah, permukiman dan fasilitas sarana prasarana dibuat untuk mendukung aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Penentuan kawasan dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya dalam sebuah ruang juga ditentukan dalam tata ruang (Sekretariat Negara RI 2007).

1.2.3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan daerah ialah SDA, dan terdapat batasan dalam beradaptasi dengan aktivitas seseorang dalam memanfaatkan SDA itu sendiri. Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa kerugian atau korban jiwa akibat penggunaan lahan yang tidak tepat melebihi kapasitasnya. Oleh karena itu, karakteristik alam suatu daerah atau wilayah perlu dipahami sedini mungkin untuk mengembangkan

potensial SDA dan kerentanan bahaya didalamnya, selanjutnya mengubahnya menjadi potensi dan pembatasan pengembangan daerah atau wilayah tersebut, Karena itu akan menguraikan kerangka sebenarnya untuk pembangunan kawasan atau daerah. (Permen Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007)

1.2.4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota

Peraturan ini memiliki ruang lingkup tentang tata cara penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, dan muatan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Peraturan ini juga menjadi pembaruan dari peraturan-peraturan sebelumnya.

1.2.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8110/MENLHK-PKT/KUH/PLA.2/11/2018.

Dalam peraturan ini memaparkan tentang penggunaan lahan hutan yang ada khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Diharapkan pada penelitian sebelumnya peneliti dapat melihat adanya *gap* antara penelitian yang sudah selesai dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, saya berharap kelebihan dan kekurangan dari studi sebelumnya dapat dipertimbangkan dan dipelajari dalam studi ini. Secara singkat gap penelitian dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Desain Penelitian	Metode	Hasil
1	(Affan, 2014) “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Permukiman Dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Sig)”.	Melakukan identifikasi kawasan yang sebelumnya adalah kawasan rawa dan sekarang menjadi kawasan permukiman dan industri di Kecamatan Genuk	“Melakukan analisis perubahan penggunaan lahan untuk permukiman dan industri di kecamatan Genuk”.	Dalam jangka 5 tahun sejak 2009 sampai 2013, penggunaan lahan kawasan pemukiman dan kawasan industri di Jalan Genuk mengalami perubahan, dan jumlah permukiman di setiap kelurahan mengalami peningkatan.
2	(Fahmi, 2015) “Evaluasi Penggunaan Lahan Dan Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara”.	Melakukan pengevaluasian penggunaan lahan dan memberikan masukan penendalian di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara	Analisis data studi ini yaitu Analysis Spasial, Analysis Neraca Sumberdaya Lahan dan Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan Lahan, Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis), Analisis Regresi. Adapun yang digunakan dalam menentukan Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan analisis deskriptif.	Dari tahun 2004 hingga 2015, pola utama perubahan penggunaan lahan di Kota Baobao ialah peralihan dari kawasan hutan dan semak belukar menjadikan wilayah pertanian lahan kering. Hasil evaluasi penggunaan lahan menghasilkan bahwasanya derajat penyimpangan antara tata guna lahan dan penataan ruang termasuk dalam pengkategorianrendah. Faktor-faktor yang berpengaruh ketidaksesuaian/ inkonsistensi antara tata guna lahan dengan penataan ruang ialah: (1) aksesibility, (2) adanya lahan pertanian, (3) peningkatan sarpras dasar wilayah.
3	(Pascasarjana, 2016) “Miranti Anisa Tejaningrum Pemodelan Perubahan Penggunaan Lahan Dan Keselarasan Penggunaan Lahan Terhadap Rtrw Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat”.	“Melakukan pemodelan perubahan penggunaan lahan dan melihat keselarasan terhadap RTRW Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat”.	Studi ini secara garis besar dibagi menjadi 5 langkah aktifitas yang menyatukan teknologi pengembangan wilayah dengan penginderaan jauh, yaitu: (1) tahapan menyiapkan dan mengumpulkan data; (2) tahap pengolahan data spasial; (3) tahap inspeksi di tempat; (4) Tahap analisis. Data, dan (5) tahap persiapan thesis.	Memperediksi dalam menggunakan lahan dalam skenario BAU menghasilkan bahwasanya penggunaannya lahan hutan akan terus meningkat sejalan dengan penurunan luas penggunaan lahan hutan rawa (19,80%), sedangkan memperediksi penggunaan lahan dengan skenario konservatif akan mempertahankan kawasan hutan rawa. Pengurangan (23,81%). Dibandingkan dengan skenario BAU (2,12%), skenario konservatif yang digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan pada tahun 2025 dapat mengurangi derajat ketidaksesuaian dengan pola spasial RTRW (1,93%).

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Desain Penelitian	Metode	Hasil
4	(Nathan & Scobell, 2012) Gunawan (2018) “Keselarasan Kelas Kemampuan Lahan Skala Semidetil Terhadap Pola Ruang Dan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Bandung”.	“Menganalisa Keselarasan Kelas Kemampuan Lahan Skala Semidetil pada Pola Ruang Dan Penggunaan Lahan”.	Penelitian ini mencakup beberapa analisis, antara lain penilaian tingkat kapasitas lahan pada skala review dan semi-terdegradasi, analisis kesesuaian antara lahan budidaya dengan tingkat kapasitas lahan, dan analisis kesesuaian antara tingkat penggunaan dan kapasitas lahan.	Kesesuaian penggunaan lahan dan kategori kapasitas lahan dari skala tinjauan adalah 69,17%, tidak layak 30,47% dan tidak terdefinisi 0,36%, kelas kemampuan lahan semi-lahan konsisten 85,15%, tidak layak 14,49% dan 0,36%.
5	(Hartoko, 2018) “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dan Arahannya Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau”.	“Melaksanakan pengindetifikasian penggunaan lahan dan arahan dalam menyempurnakan perencanaan tata ruang wilayah Kab. Pelalawan, Provinsi Riau”.	Perubahan penggunaan lahan yang terjadi dianalisis pola perubahan penggunaan lahannya dengan metode tumpang susun. Perubahan penggunaan lahan tahun 2007-2016 menghasilkan matrik probabilitas perubahan penggunaan lahan yang digunakan untuk memprediksi perubahan penggunaan lahan Tahun 2026.	Ada total 209 pola perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Peralawan. Moda perubahannya ada dua, yaitu: 1) perubahan lahan vegetasi menjadi vegetasi; 2) perubahan lahan vegetasi menjadi lahan non vegetasi. Menganalisis kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dan pola spasial, dan menganalisis bahwa penggunaan lahan yang ada konsisten dengan pola spasial 988.504 hektar (77,9%), tetapi tidak konsisten dengan 280.954 hektar (22,1%).
6	(Ourives et al., 2018) Muhammad Mu'min Fahimuddin (2016) “Analisis Daya Dukung Lahan Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara”.	Melakukan analisis daya dukung lahan	Studi ini memakai beberapa metode analisis, yaitu penggunaan metode lingkungan fisik untuk menganalisis daya dukung aktual tanah, penggunaan metode ekonomi untuk menganalisis daya dukung tanah yang sebenarnya, dan penggunaan metode daya dukung tanah untuk menyusun arahan pengelolaan tanah kota	a. “Daya dukung lahan di Kota Baubau secara fisik lingkungan baik yang ditunjukkan dengan luas lahan yang selaras lebih tinggi yakni 21 890.80 ha atau 74.68 % dibanding luas lahan yang tidak selaras yakni 7 423.13 ha atau 25.32 %”. b. Daya dukung lahan di Kota Baubau secara ekonomi memenuhi daya dukung yang ditunjukkan dengan hasil perbandingan dengan KHL (Rp8 750 000) melebihi jumlah penduduk. Nilai ekonomi lahan di Kota Baubau

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Desain Penelitian	Metode	Hasil
			kontrak.	sebesar Rp3 868 227 683 821 yang mampu menghidupi 442 083 jiwa atau 3.1 kali jumlah penduduk Kota Baubau tahun 2013.
7	(Sumber et al., 2006) Rifyan Ruman (2016) “Arahan Pengembangan Wilayah Berbasis Kemampuan Dan Potensi Lahan Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku”.	Melakukan Analisis Arahan Pengembangan Wilayah Berbasis Kemampuan Dan Potensi Lahan	Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis yaitu Metode Analisis Data Analisis Kemampuan dan Potensi Lahan, Analisis Keterkaitan Kelas Kemampuan Lahan, Penggunaan Lahan dan Pola Ruang, Location Quotient (LQ), Shift Share Analysis, Arahan Pengembangan Wilayah	c. Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas empat kawasan yaitu kawasan budidaya (7 984.60 ha atau 27.24 %), kawasan budidaya berfungsi lindung (4 030.75 ha atau 13.75 %), kawasan lindung (12 118.07 ha atau 41.34 %) dan kawasan lahan pangan dan perkebunan (5 180.52 ha atau 17.67 %). Arah pemanfaatan ruang berdasarkan kapasitas lahan menunjukkan bahwa pola spasial kawasan hutan lindung mengalami peningkatan menjadi 167.057 hektar (34,55%) yang berasal dari kawasan dengan kapasitas VIII di luar kawasan hutan produksi dan kawasan hutan terbatas, serta kawasan hutan di cagar alam mengalami peningkatan. Menjadi 12.543 hektar (2.59%). Areal pengembangan pertanian di lahan kering meningkat menjadi 26.069 hektar (5,39%) yang berasal dari wilayah dengan kemampuan Kelas III dan IV.
8	(Ourives et al., 2018) “Gandang Maulana Andira Kelas Kemampuan Lahan Kawasan Budidaya Di Kecamatan Jasinga Dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”.	Melakukan klasifikasi Kemampuan Lahan Kawasan Budidaya.	Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis, yaitu menggambar satuan lahan semi kosong, mengamati karakteristik lahan pada satuan lahan skala semi kosong, dan menilai evaluasi masing-masing tipe dan tingkat kapasitas lahan dari lahan subur.	
9	(Hidayat, Rustiadi, & Kartodihardjo, 2015)Wahyu Hidayat, Ernani Rustiadi, Hariadi	menganalisis kemampuan lahan ketersediaan air tanah di Kab Pasuruan	Metode Analisis dirancang sesuai tujuan dengan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:	Kabupaten Pasuruan mempunyai Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air Tanah sangat besar, dengan total luas 831,6 Ha. Besar potensi airtanah di Kabupaten Pasuruan menurut

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Desain Penelitian	Metode	Hasil
	Kartodihardjo “Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang” “(Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)”.		a. Analisis Perubahan Tutupan/Penggunaan Lahan b. Analisis Prediksi Tutupan/Penggunaan Lahan c. Analisis Dampak Pertambangan d. Analisis Kesesuaian Peruntukan Ruang	Dinas ESDM sebesar 43 juta m3/tahun.
10	(Ourives et al., 2018)I Made Haribhawana Wijaya “Kesesuaian Hutan Dan Kemampuan Lahan Sebagai Indikator Sinkronisasi Pola Ruang Dalam Perbaikan Ruang”. (Studi Kasus Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan)	Menganalisis kemampuan lahan, kesesuaian fungsi dan status kawasan fungsi hutan serta penutupan lahan (landcover) di Kabupaten Kotabaru.	Dilakukan dengan 2 metode analisis yaitu : a. Analisis Kemampuan Lahan b. Analisis kesesuaian fungsi dan status kawasan hutan	Berdasarkan hasil evaluasi antara faktor pengedali dan penutupan lahan terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru 2012 sampai 2032 diperoleh sebagai berikut : 1) Wilayah inkonsistensi kemampuan lahan terjadi pada kelas II, III, IV, VI dan VIII terhadap peruntukan lahan RTRW Kabupaten Kotabaru tahun 2012 sampai 2032. Wilayah inkonsistensi kemampuan lahan terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru terjadi seluas 238 422.51 Ha atau 35.27 % dari luas total wilayah kajian penelitian.